

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA REKRUTMEN POLITIK PADA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Monalisa C. Tumanduk¹

Agustinus B. Pati²

Jones Tompodung³

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di Kabupaten Minahasa Selatan. Rekrutmen Politik di Indonesia sejak orde baru sampai orde reformasi mengalami pasang surut. Pada orde baru fungsi partai tidak berjalan dengan baik karena partai lebih menitik beratkan untuk menjadi kaki tangan pemerintah daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat sehingga fungsi parpol melemah, termasuk juga fungsi rekrutmen. Sedangkan pada era reformasi rekrutmen politik masih juga belum tertata dengan baik. Pada era ini justru menimbulkan banyak konflik yang terjadi diantara tubuh partai politik itu sendiri karena rekrutmen yang tidak prosuderal sehingga out-put yang dihasilkan juga kurang. Penelitian ini berlokasi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian terlihat Rekrutmen politik pada PDC PDI Perjuangan Minahasa Selatan dilaksanakan sesuai aturan partai dan tidak melanggar undang-undang yang berkenaan dengan rekrutmen politik. Rekrutmen anggota baru dilakukan oleh seluruh kader PDI Perjuangan dengan berbagai cara antara lain ajakan, persuasi serta mensosialisasikan eksistensi partai melalui koran, majalah, televisi dan *website* serta melalui keaktifan kader partai. Faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen anggota oleh DPC antara lain adanya pengorganisasian PDI Perjuangan yang solid dibuktikan dengan struktural partai yang terdapat anggota dan kepengurusan partai sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW)

Kata Kunci: Implementasi, Rekrutemen, Partai Politik, PDI Perjuangan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Pendahuluan

Rekrutmen Politik di Indonesia sejak orde baru sampai orde raformasi mengalami pasang surut. Pada orde baru fungsi partai tidak berjalan dengan baik karena partai lebih menitik beratkan untuk menjadi kaki tangan pemerintah daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat sehingga fungsi parpol melemah, termasuk juga fungsi rekrutmen. Sedangkan pada era reformasi rekrutmen politik masih juga belum tertata dengan baik. Pada era ini justru menimbulkan banyak konflik yang terjadi antara tubuh partai politik itu sendiri karena rekrutmen yang tidak prosuderal sehingga out-put yang dihasilkan juga kurang.

Gagasan mengenai partisipasi rakyat dalam negara demokrasi mempunyai dasar idiologis, bahwa dalam proses pemberian suara, rakyat menjalankan hak dan kewajiban mereka untuk memilih siapa yang memerintah mereka dan menentukan wakil-wakil mereka yang nantinya menentukan kebijakan umum (*Public policy*). Selain itu, sebagai negara demokrasi, Indonesia harus menghargai dan menghormati adanya hak asasi manusia (HAM), artinya Indonesia harus mengakui hak-hak warga negara antara lain; Hak untuk berkumpul, mendirikan perserikatan, menyatakan pendapat dan pemikirannya. Perkumpulan dan perserikatan dapat dilihat dari adanya organisasi kemasyarakatan, serikat kerja, LSM dan partai politik (*Afifa, 2011*).

Partai Politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Partai Politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai Lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih mudah dibandingkan dengan organisasi negara. Banyak kalangan berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, artinya, semakin tinggi peran

dan fungsi partai politik, akan semakin berkualitaslah demokrasi. Begitupula yang terjadi di Indonesia bahwa partai politik dianggap sebagai pilar utama bagi demokrasi, oleh karena itu perkembangan partai politik di Indonesia perlu untuk terus dikaji dan diperhatikan agar peran dan fungsi partai politik bisa berjalan sebagaimana semestinya guna perkembangan demokrasi di Indonesia yang lebih baik (*Miriam Budiardjo 2013 : 405*).

Partai politik hadir di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan idiologi tertentu. Cara yang di gunakan oleh partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.

Partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokratis. Oleh karenanya, partai politik harus memiliki landasan hukum yang pasti. Partai politik diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Keberadaan partai politik tidak terlepas dari fungsi yang menjadi tanggung jawab partai politik untuk menjalankannya. Secara umum fungsi partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik, partisipasi politik, artikulasidan agregasi kepentingan serta pembuat kebijakan (*Suprihatini, 2008;19*).

Sebagai motor penggerak partai politik harus memiliki kader-kader yang loyal dan berkualitas. Oleh karena itu partai politik melakukan kaderisasi dan proses rekrutmen politik. Proses-proses dalam partai politik ini harus berjalan dengan terstruktur, sistematis dan massif mulai dari tingkatan terendah. Dalam hal ini tujuannya bukan hanya untuk mencapai tujuan pragmatis partai politik dalam memenangkan pemilu tetapi juga agar proses demokratisasi di Indonesia benar-benar bertujuan untuk menjawab janji kemerdekaan yaitu menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Salah satu fungsi partai politik yaitu rekrutmen politik, yaitu fungsi yang berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Berkaitan dengan rekrutmen politik diatur sebagaimana bunyi UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pada pasal 11 yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Semakin besar andil partai politik untuk memenangkan perjuangan dalam pengisian jabatan politik, merupakan indikator bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

Sumber daya yang paling utama dalam berpolitik adalah sumber daya manusia, karena partai politik tidaklah digerakkan oleh mesin dan teknologi, tetapi oleh manusia. Dengan demikian, cara organisasi partai politik dalam mendapatkan manusia yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi merupakan tantangan utama dalam hal manajemen organisasi partai politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen, tentunya orang yang memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga akan terjadi untuk memperebutkan orang-orang berpotensi yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya (*Firmanzah, 2008 : 248*).

PDI Perjuangan salah satu partai besar yang memiliki masa yang cukup banyak, salah satunya di Kabupaten Minahasa Selatan. Selain sebagai partai politik dengan

perolehan suara terbanyak di pemilihan legislatif, PDI Perjuangan juga berhasil memenangkan pasangan Franky Donny Wongkar dan Petra Yani Rembang dalam PILKADA serentak tahun 2020 dengan jumlah suara 74.875 (*ManadoPost.id, 17 Desember 2020*). PDI Perjuangan berhasil memperoleh 10 kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Sebagai partai besar, PDI Perjuangan memiliki kader dan simpatisan yang tersebar di seluruh Provinsi Indonesia, maka dari itu PDI Perjuangan sangat disoroti dan diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan fungsinya sebagai partai politik, terlebih pada fungsi dalam melakukan rekrutmen politik.

Kemenangan dalam pemilu bukan otomatis berarti selesainya tugas partai politik, kemenangan dalam pilkada hanyalah langkah awal dari proses yang panjang untuk keberlangsungan partai politik itu sendiri kedepannya. Partai politik sebagai agen demokrasi mempunyai tugas yang tidak ringan. Sebagai motor penggerak partai politik harus memiliki kader-kader yang loyal dan berkualitas. Oleh karena itu partai politik melakukan kaderisasi dan proses rekrutmen politik. Proses-proses dalam partai politik ini harus berjalan dengan terstruktur, sistematis dan massif mulai dari tingkatan terendah. Dalam hal ini tujuannya bukan hanya untuk mencapai tujuan pragmatis partai politik dalam memenangkan pemilu tetapi juga agar proses demokratisasi di Indonesia benar-benar bertujuan untuk menjawab janji kemerdekaan yaitu menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, peran dan fungsi internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melangsungkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi, disini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

Rekrutmen politik yang dimaksud adalah rekrutmen politik yang dilaksanakan PDI-Perjuangan tingkat Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu rekrutmen terhadap warga Indonesia untuk menjadi anggota dan kader dalam menggantikan anggota dan kader lama dan rekrutmen untuk menjadi pengurus DPC.

Tinjauan Pustaka Implementasi

Implementasi adalah hal penting untuk mewujudkan suatu gagasan seseorang harus mengimplementasikan gagasan untuk mencapai tujuannya. Implementasi adalah proses yang diterapkan diberbagai bidang, tanpa batasan apapun. Untuk mengimplementasikan suatu gagasan diperlukan serangkaian proses, menerapkan rencana strategis sama pentingnya, atau bahkan lebih penting, daripada strategi itu sendiri. Implementasi adalah proses yang diterapkan dibanyak bidang seperti pendidikan, social, politik, teknologi, kesehatan, informasi, dan banyak lagi.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga diartikan sebagai pengembangan versi kerja system dari desain yang diberikan. Pengertian implementasi menurut para ahli

1. Sudarsono

Menurut Sudarsono dalam bukunya analisis kebijakan publik, implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.

2. Solichin Abdul Wahab

Menurut Solichin, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Partai Politik

Menurut Badudu (2001:100) bahwa,

“partai berasal dari dan kata “part” yang berarti “bagian” dan menunjukan bagian dari pada warga Negara, sedangkan “partai” menunjukan pada sekumpulan orang-orang. Jadi menunjukan pada sekumpulan sejumlah warga dan suatu Negara yang menggabungkan suatu kesatuan yang mempunyai tujuan tertentu. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengeruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Menurut Budiardjo (2013 : 405-409) partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik

Dimasyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara dipadang pasir, apabila yang ditampung akan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi partai politik.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik

Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, peer group, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan, dan partai politik. Ia juga menjadi penghubung yang mengsosialisasikan nilai-nilai politik generasi satu ke generasi yang lain. Disinilah letak partai dalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya.

3. Sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah

seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepemimpinan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

4. Sebagai sarana pengatur konflik. Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, tau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Secara singkat dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam dan berkembang di berbagai kelompok masyarakat.

Rekrutmen

Dalam fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik terdapat konsep sistem dalam proses pengkaderan, merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, karena sebuah partai politik memiliki sistem kaderisasi yang berbeda tergantung dari model partai yang dianutnya (*Efriza. Op.Cit. hal.217*). Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah kepemimpinan baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas sebab dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional

(*Meilandi,2018*).

Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir digunakan untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kerangka berfikir dalam penelitian fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Minahasa Selatan.

Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan berperan sebagai pelaksana rekrutmen di tingkat Kabupaten Minahasa Selatan. Pelaksanaan rekrutmen politik didasarkan pada peraturan perundang-undangan, AD/ART partai, serta Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan rekrutmen politik. PDI Perjuangan merekrut anggota, kader, dan pengurus partai politik untuk kelestarian internal partai, untuk kemudian dilakukan kaderisasi dan seleksi kepemimpinan untuk meningkatkan kualitas SDM partai yang nantinya akan dicalonkan dan diperjuangkan dalam pemilihan umum, baik anggota legislatif maupun sebagai pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Semakin banyak anggota partai yang menduduki jabatan politik menjadi indikator implementasi rekrutmen politik oleh partai berhasil.

Pelaksanaan rekrutmen politik tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat baik dari internal maupun eksternal partai. Partai politik perlu melakukan upaya mengantisipasi dan mengatasi hambatan yang ada. Apabila upaya yang dilakukan partai berhasil dan diperkuat dengan faktor pelaksanaan rekrutmen politik, maka partai akan mendapat dukungan dari masyarakat untuk memperoleh suara dalam pemilu, kader partai dapat menduduki jabatan politik dan strategis, anggota partai akan semakin bertambah, serta agenda partai dapat berjalan lancar. Apabila upaya gagal dilakukan maka partai akan mengalami kemunduran, dukungan rakyat tidak ada, anggota berkurang, dan sulit menempatkan kadernya dalam jabatan strategis dalam pemerintahan

Metode Penelitian

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah mendeskripsikan Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kabupaten Minahasa Selatan.

Adapun wawancara akan dilakukan :

1. Ketua DPC PDIP Kabupaten Minahasa Selatan
2. Sekertaris DPC PDIP Kabupaten Minahasa Selatan
3. Bendahara DPC PDIP Kabupaten Minahasa Selatan
4. Anggota DPRD PDIP Minahasa Selatan Dapil II
5. Wakabid Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Minahasa Selatan

Pembahasan

1. Implementasi Rekrutmen Politik oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Minahasa Selatan

Fungsi rekrutmen yang dilaksanakan partai politik secara umum adalah proses dalam mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik. Dalam fungsi rekrutmen berkaitan erat dengan kaderisasi dan masalah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam internal partai maupun jabatan politik dalam. Rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Minahasa Selatan yaitu rekrutmen terhadap anggota baru. Kegiatan pelaksanaan rekrutmen politik dilakukan untuk regenerasi ditubuh pengurus dan agar partai mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri dengan memiliki kader-kader yang loyalitas dan berkualitas.

Hubungan antara fungsi rekrutmen politik dengan proses mekanisme politik atau seleksi kepemimpinan internal partai maupun dalam menetapkan calon anggota legislatif dan menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat berkaitan erat. Proses menyiapkan sumber daya manusia melalui pelatihan kaderisasi agar kelak menjadi para pemimpin yang

mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus. Pelaksanaan rekrutmen politik menjadi tanggung jawab partai politik untuk kelestarian partai dan mencetak pemimpin yang berkualitas. Dibalik pentingnya fungsi rekrutmen dalam partai politik namun sepertinya dalam pelaksanaan belum dilaksanakan dengan baik oleh partai itu sendiri, pada kenyataannya ketertarikan masyarakat pada umumnya masih rendah. Menjadi anggota partai politik bukanlah suatu hal yang menarik atau istimewa bagi masyarakat umumnya, dan penting dilakukan sosialisasi oleh partai politik untuk mengajak masyarakat agar mau bergabung. Kenyataan lain adalah pelaksanaan rekrutmen anggota baru gencar dilaksanakan menjelang momentum pemilihan umum saja untuk kepentingan partai dalam verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh KPU.

Rekrutmen Politik	Asal calon	Seleksi Calon	Keputusan akhir
Kader	Terbuka-terbatas	DPC	DPP
Anggota Legislatif	Terbuka	DPP	DPP
Kepala daerah/wakil kepala daerah	Terbuka	DPP	DPP

Table 4.1 Model Rekrutmen Politik DPC PDI Minahasa Selatan

Sumber DPC PDI Minahasa Selatan

2. Pelaksanaan Rekrutmen Anggota dan Kader DPC PDI Perjuangan Minahasa Selatan

Pelaksanaan rekrutmen anggota dan kader PDI Perjuangan tentunya memiliki landasan tersendiri. Pelaksanaan rekrutmen anggota dan kader PDI Perjuangan Minahasa Selatan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam partai, yaitu AD/ART PDI Perjuangan dan Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Nomor 03 tahun 2016 tentang Sistem Penerimaan Anggota dan Manajemen Informasi Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pelaksanaan rekrutmen anggota baru menjadi tanggungjawab bersama seluruh elemen di DPC PDI Perjuangan Minahasa Selatan.

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Begitupula dengan internal pengurus partai yaitu menjadi kewajiban seluruh pengurus di DPC PDI Perjuangan Minahasa Selatan dalam melakukan rekrutmen anggota baru, bukan saja hanya tugas salah satu pengurus tertentu saja.

Pelaksanaan rekrutmen anggota baru partai politik bersifat terbuka untuk umum dan dilakukan secara sadar dan sukarela. Fungsi rekrutmen politik sangat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas untuk mengisi partai politik. Sumber daya yang paling utama dalam berpolitik adalah sumber daya manusia, karena sistem politik itu sendiri digerakkan oleh manusia. Melihat hal ini peneliti berpendapat fungsi rekrutmen politik sangat fundamental dan butuh keseriusan partai politik dalam mengurus penyediaan dan pembangunan sumber daya manusia dalam partai politik.

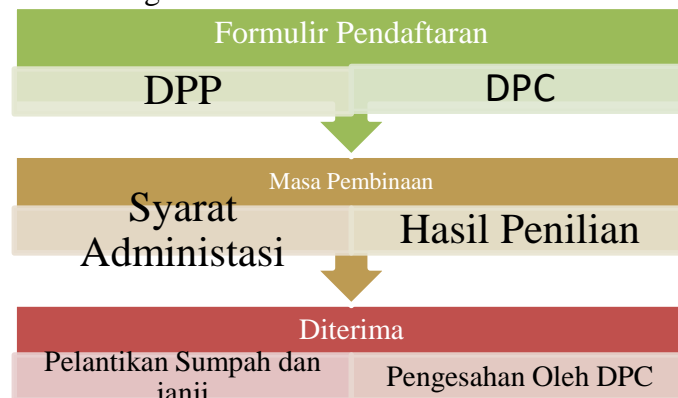
Melihat kenyataannya, ketertarikan masyarakat untuk bergabung dalam partai politik masih kurang. Persoalannya siapa yang mau jadi anggota dan apa keuntungan menjadi anggota partai politik ditengah carut marut sistem perpolitikan di Indonesia. Banyak ditemukan partai melakukan *asal comot* dalam penugasan anggota partai menjadi calon legislatif hanya dengan melihat popularitas dan harta kekayaan yang di miliki seseorang misalnya dari kalangan artis dan pengusaha. Sehingga bukanlah menjadi suatu yang istimewa menjadi bagian dari partai politik jika melihat kecenderungannya adalah partai kerap kali hanya memanfaatkan anggota baru hanya pada saat momentum pemilihan umum untuk melengkapi syarat KPU dalam urusan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan pasal 10 menyebutkan bahwa anggota partai adalah calon anggota yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan anggota. Mengenai persyaratan anggota partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah sebagai berikut :

1. WNI yang telah berumur 17 tahun dan atau sudah menikah.

2. Menyetujui dan menaati Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan partai.
3. Bersedia menaati dan menegakkan disiplin partai
4. Bersedia mengikuti kegiatan partai

Mekanisme implementasi rekrutmen anggota PDI Perjuangan dapat digambarkan melalui bagan dibawah ini :



Gambar Bagan 4.2. Mekanisme penerimaan anggota baru

Sumber: DPC PDI Minahasa Selatan

Paradigma keanggotaan partai politik harus benar, anggota harus dianggap sebagai sumber daya krusial untuk partai. Anggota diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dengan aktif dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan , agar kesetiaan terhadap partai dan keterikatan dapat dijaga dan rasa memiliki terhadap partaipun dapat dibangun pada masing-masing anggota partai.

3. Rekrutmen Calon Legislatif oleh DPC PDI Perjuangan Minahasa Selatan

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif dilakukan selama 5 tahun sekali.

Pada pasal 29 dijelaskan tentang rekrutmen politik. Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia. Dalam pasal ini juga mencakup rekrutmen terhadap bakal calon anggota legislatif. Dijelaskan rekrutmen sebagaimana yang

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

dimaksud pada ayat satu (1) huruf b (bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Persyaratan bagi setiap bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam UU No 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD seperti tertuang pada pasal 51, yaitu sebagai berikut:

1. WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
3. Bertempat tinggal di wilayah NKRI
4. Cakap bicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia
5. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA), atau bentuk lainnya yang sederajat
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945, cita-cita proklamasi 1945
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih
8. Sehat jasmani dan rohani
9. Terdaftar sebagai pemilih
10. Bersedia bekerja penuh waktu
11. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan

penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk kelengkapan administrasi bakal calon perlu dibuktikan dengan syarat-syarat berikut ini :

- a. Kartu Tanda Penduduk WNI
- b. Bukti kelulusan berupa fotocopy ijazah, STTB, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisir oleh satuan Pendidikan atau program Pendidikan menengah
- c. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri setempat
- d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani
- e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih
- f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup
- g. Kartu Tanda Anggota partai politik peserta pemilu.
- h. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Dalam rekrutmen calon anggota legislatif di Minahasa Selatan dilakukan dengan dua tahap :

1. Tahap Penjaringan

Penjaringan adalah bagian dari proses rekrutmen calon anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan atau DPR RI oleh struktural partai di masing-masing tingkatan struktural partai. Setiap anggota partai berhak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota melalui

struktural partai pada masing-masing tingkatan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh perundang-undangan dan peraturan partai. Tahap penjarangan yang dijelaskan oleh DPC PDI Kabupaten Minahasa Selatan yaitu penyaringan dimulai dengan pengisian formulir rekrutmen Caleg oleh anggota partai yang direkrut disertai dengan data pendukung bukti diri, sesuai dengan format dokumen yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan. DPC membawa seluruh nama bakal Caleg yang terjaring di Musancabsus dan yang dijaring oleh DPC partai ke Rakercabsus. Sebelum dilakukan verifikasi, nama-nama yang terjaring diumumkan dalam forum Rakercabsus/Rakerdasus. Kemudian dilakukan verifikasi terhadap kebenaran pengisian formulir rekrutmen dan kebenaran data pendukung bukti diri calon legislatif.

2. Tahap Penetapan

Penetapan nomor urut adalah menetapkan nomor urut calon yang akan diajukan oleh partai yang diputuskan melalui rapat struktur partai pada tingkatannya. Tahap penetapan dilakukan setelah tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi persyaratan, kebenaran pengisian formulir rekrutmen serta kebenaran data pendukung bukti diri Caleg pada tahap penyaringan.

4. Faktor Pendukung Pelaksanaan Rekrutmen Politik

Pelaksanaan rekrutmen politik DPC PDI Perjuangan Minahasa Selatan didukung struktur organisasi partai yang tersebar hingga Kecamatan yaitu PAC PDI Perjuangan dan struktur dibawahnya yaitu Ranting PDI Perjuangan dan Anak Ranting PDI Perjuangan yang tersebar di Rukun Warga Minahasa Selatan sudah ada.

Faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen anggota oleh DPC antara lain adanya pengorganisasian PDI Perjuangan yang solid dibuktikan dengan struktural partai yang terdapat anggota dan kepengurusan partai sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW). Selain itu, didukung oleh kondisi masyarakat Minahasa Selatan yang sebagian besar berbasis nasionalis,

sesuai dengan basis dari PDI Perjuangan sendiri, sehingga memudahkan dalam menyampaikan visi misi partai dan memudahkan dalam pendekatan dengan masyarakat untuk mendapat dukungan. Masyarakat Minahasa Selatan sebagian besar berbasis nasionalis dapat dibuktikan dengan perolehan suara hasil pemilu. Penjelasan terkait hal yang mendukung pelaksanaan rekrutmen politik juga dikarenakan PDI Perjuangan sebagai partai penguasa atau partai pemerintah, yang mendukung program dan kebijakan pemerintah serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat agar program dapat sampai kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat akan terus ikut mendukung PDI Perjuangan.

Faktor pendukung lainnya memang pengurus partai harus bekerja lebih giat lagi mensosialisasikan kepada masyarakat, partai politik ini kan harus ada dia dan harus di isi oleh orang – orang yang punya integritas, loyalitas dan moral. Jadi kalau disederhanakan itu orang baik, partai politik harus diisi orang baik. Kalau tidak diisi oleh orang baik maka orang yang tidak baik yang akan mengisinya. Partai diisi oleh orang baik, maka negara juga akan dikelola dengan baik. Dengan adanya kemenangan-kemenangan PDI Perjuangan di tingkat Minahasa Selatan , dengan sendirinya akan mendorong antusias masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi anggota PDI Perjuangan terlebih pada individu yang bermaksud mencalonkan diri dalam jabatan politik dengan mengendarai PDI Perjuangan sebagai mesin politik. Masyarakat akan menaruh kepercayaan pada PDI Perjuangan selama wakil-wakil PDI Perjuangan yang menjadi wakil rakyat di DPR dan DPRD dan yang menjadi pasangan Bupati/wakil Bupati terpilih dapat membuktikan kinerja dan kredibilitas yang bekerja untuk rakyat dan demi kepentingan rakyat. Masyarakat akan mendukung PDI Perjuangan apabila PDI Perjuangan dapat melahirkan tokoh-tokoh yang berkompeten.

Pengorganisasian PDI Perjuangan yang solid dibuktikan dengan struktur partai yang terdapat anggota dan kepengurusan partai

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

sampai dengan tingkat Rukun Warga. Kemudian pelaksanaan rekrutmen politik juga didukung oleh saya partai itu sendiri yang juga basis dari sayap partai menyebar di tengah masyarakat luas memudahkan dalam pendekatan pada masyarakat dengan adanya organisasi-organisasi sayap PDI Perjuangan seperti Banteng Muda Indonesia, Taruna Merah Putih, Komunitas Mahasiswa dan Pelajar yang direkrut dari beberapa kalangan masyarakat dapat membantu dalam pelaksanaan rekrutmen politik, memperoleh anggota baru dan juga memperkuat dukungan terhadap partai menjelang pesta demokrasi yaitu pemilihan umum, serta seleksi kepemimpinan yang cukup baik sehingga dalam menampilkan tokoh-tokoh sebagai pemimpin dan wakil rakyat, PDI Perjuangan tidak kesulitan mencari kader berkualitas yang nantinya akan diperjuangkan dalam pemilu untuk menempati jabatan politik.

Ada faktor lain yang juga turut mendukung pelaksanaan rekrutmen politik pada DPC PDI Perjuangan yaitu faktor ketokohan. Faktor yang mendorong warga masyarakat untuk memberi dukungan bahkan sampai menjadi anggota/kader PDI Perjuangan salah satunya karena figur dari tokoh-tokoh PDI Perjuangan seperti figur Bung Karno dan figur Megawati yang masih banyak dikagumi masyarakat. Selain 2 (dua) figur itu, menurut saya kader PDI Perjuangan juga mempengaruhi pilihan masyarakat. Jika kader-kader PDI Perjuangan berperilaku baik, masyarakat juga akan menilai baik terhadap partai.

Kesimpulan

Rekrutmen politik pada PDC PDI Perjuangan Minahasa Selatan dilaksanakan sesuai aturan partai dan tidak melanggar undang-undang yang berkenaan dengan rekrutmen politik. Rekrutmen anggota baru dilakukan oleh seluruh kader PDI Perjuangan dengan berbagai cara antara lain ajakan, persuasi serta mensosialisasikan eksistensi partai melalui koran, majalah, televisi dan *website* serta melalui keaktifan kader partai.

Tanggungjawab pelaksanaan rekrutmen politik adalah seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan partai. Rekrutmen politik bertujuan sebagai penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, akan tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal oleh DPC PDI Perjuangan jika melihat tidak berjalan lancar proses kaderisasi yaitu terlambatnya dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anggota demi mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas dalam partai.

PDI Perjuangan diperlukan untuk dapat menyaring anggota maupun kader yang memang se-asas, seideologi dan satu tujuan dengan partai, menyiapkan kader-kader partai, serta pengurus partai yang berkualitas. Pendidikan Politik yang dilakukan oleh DPC salah satunya dengan diadakan pementapan ideologi partai, sosialisasi sikap politik dan pemahaman organisasi politik kepada struktur partai maupun kader partai.

Faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen anggota oleh DPC antara lain adanya pengorganisasian PDI Perjuangan yang solid dibuktikan dengan struktural partai yang terdapat anggota dan kepengurusan partai sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW). Selain itu, didukung oleh kondisi masyarakat Minahasa Selatan yang sebagian besar berbasis nasionalis, sesuai dengan basis dari PDI Perjuangan sendiri, sehingga memudahkan dalam menyampaikan visi misi partai dan memudahkan dalam pendekatan dengan masyarakat untuk mendapat dukungan. Masyarakat Minahasa Selatan sebagian besar berbasis nasionalis dapat dibuktikan dengan perolehan suara hasil pemilu. Penjelasan terkait hal yang mendukung pelaksanaan rekrutmen politik juga dikarenakan PDI Perjuangan sebagai partai penguasa atau partai pemerintah, yang mendukung program dan kebijakan pemerintah serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat agar program dapat sampai kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat akan terus ikut mendukung PDI Perjuangan.

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Saran

Dalam pelaksanaan rekrutmen politik sebaiknya menggunakan cara yang tidak kotor melakukan rekrutmen dengan cara yang baik sesuai dengan mekanisme yang sudah ada. Bertanggung jawab penuh dalam perekrutmen ini adalah DPC yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam penyaringan anggota maupun kader yang ada DPC dapat menyiapkan calon kader-kader partai serta pengurus yang berkualitas. Mengingat pentingnya kaderisasi maka diperlukan pengoptimalan kembali dalam kaderisasi.

Dalam rekrutmen politik yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan faktor pendukung juga perlu diterapkan dalam rekrutmen politik ini dengan dibuktikan dengan solidaritas dalam structural partai yang ada sehingga masyarakat Minahasa Selatan mengerti terkait hal-hal yang mendukung pelaksanaan rekrutmen partai politik.

Daftar Pustaka

- A.Wawan & Dewi M. 2011. *Teori dan Afifa*, Wakhidatul. 2011. *Implementasi Fungsi Partai Politik kota Semarang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2010-2015*.
Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Buku Obor
Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (132).
Budiono. 2005. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Surabaya : Alumni Bagan : Michael Rush dan Phillip Althoff. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik: Alih Bahasa oleh Kartini Kartono*. PT Raja Grafindo Persada.. Jakarta. hal.248
Badudu (2001:100)
Carld Freidrich
DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Efriza. 2012. *Political Explorer: Sebuah*

Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta.

- Firmansyah. 2008. *Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Politik Di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Giovani Sartori
Gabriel A. Almond
Hamid, Ahmad. 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh-Desentralisasi dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Haryanto. (1984). *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*. Jogjakarta: Liberty.
Hamid, Ahmad. F. 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh - Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemirnaan.
<http://kpu.go.id/> yang diakses pada tanggal 17 desember 2021
Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 1997. Jakarta : Balai Pustaka, 854.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hanjoyo. Maraham dkk. 2014. *Pandom Media Nusantara*.
Lexi Moleong. 2016. *Metode penelitian Kualitatif* . (Bandung : PT Rosda Karya, 132).
ManadoPost.id, 17 Desember 2020
Maran, Rafael. R. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan kedua.
Meilandi 2018
Prayitno, Budi. 2009. *Pelembagaan Politik Jateng*. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
Suyanto, Bagong dan sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif (Pendekatan*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.)
Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia).
Salim, Peter. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English
Sudarsono
Solichin Abdul Wahab.

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Suprihatini, Amin. 2008. *Partai Politik di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.

Umichulsum. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kashiko Press

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

www.idjoel.com, Penertian Menurut Para Ahli, 2021.

Yanto, Oksidelfa. 2005. (*Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Tatanan Demokrasi: Antara Harapan dan Kenyataan: jurnal*)